



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADE VICTOR MANAMPANG MANGAPUTUA SIAHAAN
2. Jabatan : KEPALA SATGAS POL. PP KEC. CILANDAK
3. NHK : 235101

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.669.876.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 357 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , WARISAN Rp. 779.354.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m²/84 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , WARISAN Rp. 448.448.000
3. Tanah Seluas 951 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , WARISAN Rp. 2.069.376.000
4. Tanah Seluas 654 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , WARISAN Rp. 1.538.208.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m²/185 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , WARISAN Rp. 1.959.105.000
6. Tanah Seluas 315 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 875.385.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 708.500.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA SEDAN Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 535.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 112.315.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.655.239.207
F. HARTA LAINNYA	Rp.	246.000.000
Sub Total	Rp.	12.391.930.207
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.391.930.207

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.